

## **PRINSIP AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN *VALUE FOR MONEY* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PADA MASJID (Studi Kasus Pada Masjid Baitul Gafur di Lingkungan Gebang)**

**Siti Raodatul Jannah<sup>1</sup>**  
[sirajannah3101@gmail.com](mailto:sirajannah3101@gmail.com)  
<sup>1</sup> Universitas Mataram

**Nur Fitriyah<sup>2</sup>**  
[nurfitriyah@unram.ac.id](mailto:nurfitriyah@unram.ac.id)  
<sup>2</sup> Universitas Mataram

**Indria Puspitasari Lenap<sup>3</sup>**  
[indrialenap@unram.ac.id](mailto:indrialenap@unram.ac.id)  
<sup>3</sup> Universitas Mataram

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan *value for money* dalam pengelolaan keuangan pada Masjid Baitul Gafur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan penelitian ini yaitu Takmir Masjid, Bendahara Masjid, Ketua Bidang Dakwah/Peribadatan dan Pendidikan Masjid dan 3 Jama'ah Masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Masjid Baitul Gafur telah berjalan dengan baik, meskipun pencatatan keuangan masih sederhana dan belum sesuai dengan pedoman ISAK 35. Transparansi diupayakan melalui keterbukaan informasi, publikasi laporan keuangan secara lisan setiap shalat jum'at dan penyediaan informasi yang jelas mengenai pemasukan dan pengeluaran dana. Meskipun demikian, masih ada catatan mengenai kurangnya informasi detail terkait pengeluaran dana. *Value for money* menunjukkan perbaikan signifikan dalam ekonomis, dari kurang ekonomis di tahun 2020 menjadi sangat ekonomis pada tahun 2022 dan 2023. Efisiensi dalam menghasilkan pendapatan cenderung meningkat, dan efektivitas dalam mencapai target pendapatan menunjukkan peningkatan dramatis di tahun 2022 dan 2023. Pengelolaan keuangan Masjid Baitul Gafur masih dilakukan dengan metode pencatatan sederhana yaitu penerimaan dan pengeluaran kas oleh para pengurus karena dirasa itu sudah cukup dan tidak membingungkan para pengurus dalam mengkategorikan setiap transaksi yang ada.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, *Value for Money*, Pengelolaan Keuangan

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the application of the principles of accountability, transparency and value for money in financial management at the Baitul Gafur Mosque. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The informants of this study were the Mosque Takmir, Mosque Treasurer, Head of the Dakwah/Worship and Education Division of the Mosque and 3 Mosque Congregations. The results of the study indicate that accountability in the financial management of the Baitul Gafur Mosque has been running well, although financial records are still simple and not in accordance with the ISAK 35 guidelines. Transparency is attempted through openness of information, publication of financial reports verbally every Friday prayer and provision of clear information regarding income and expenditure of funds. However, there are still notes regarding the lack of detailed information regarding expenditure of funds. Value for money shows significant improvements in economics, from less economical in 2020 to very economical in 2022 and 2023. Efficiency in generating income tends to increase, and effectiveness in achieving income targets shows a dramatic increase in 2022 and 2023. The financial management of the Baitul Gafur Mosque is still carried out using a simple recording method, namely cash receipts and disbursements by the administrators because it is considered sufficient and does not confuse the administrators in categorizing each existing transaction.

**Keywords:** Accountability, Transparency, *Value for Money*, Financial Management

## PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba merupakan sebuah organisasi publik yang bergerak dalam pelayanan sosial yang dikelola oleh masyarakat tanpa ada maksud untuk mencari keuntungan. Suatu organisasi nirlaba memperoleh sumber dayanya dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan, menghasilkan barang atau jasa tanpa memupuk laba, dan tidak memiliki kepemilikan. Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, sekolah, rumah sakit, klinik publik, organisasi politis, organisasi masyarakat, dan serikat buruh. Organisasi keagamaan mengacu pada organisasi dalam sebuah tempat peribadatan misalnya masjid (Endang, 2017).

Masjid dibentuk dalam suatu organisasi yang terdiri dari struktur organisasi yang dimana memiliki tugas nya masing-masing dalam mengelola masjid, termasuk didalamnya pengelolaan dana Masjid (Ismatullah & Kartini, 2018)(Pratama et al., 2023). Masjid pada saat ini banyak digunakan sebagai pusat penerimaan zakat, infak dan sedekah yang berpotensi besar untuk memberi kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat, baik secara penggalangan dana maupun penyediaan fasilitas.

Dari sumber dana yang banyak tersebut, maka aliran keuangan atau kas masuk masjid akan sangat banyak, sehingga perlu dikelola dengan sebaik mungkin sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pentingnya penyajian laporan keuangan masjid adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap dana yang telah diterima pengurus masjid dengan menerapkan peraturan penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 35 (ISAK 35).

Penelitian terkait akuntabilitas dilakukan oleh Makrifudin et al., (2022) dan Putri et al., (2022) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan masjid masih belum mengetahui secara detail tentang ISAK 35, sehingga laporan keuangan masih sederhana, hanya mencakup penerimaan, pengeluaran dan kas saldo. Sedangkan N. A. Sari et al., (2022) mengatakan bahwa Masjid Sabilillah telah menerapkan beberapa bentuk akuntabilitas, terkait dengan laporan keuangan yang dibuat masih belum berpedoman pada ISAK 35 dan masih mengacu pada standar yang lama.

Beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan masjid diantaranya Kusumadyahdewi, (2018), Haryanti & Kaubab, (2019), Tarmizi & Kurniawan, (2016) dan Juniaswati & Murdiansyah, (2022). Hasil penelitian Kusumadyahdewi, (2018) menyatakan bahwa laporan keuangan masjid yang berupa catatan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan selalu ditempel di papan pengumuman masjid. Haryanti & Kaubab, (2019) menyatakan bahwa bentuk transparansi keuangan masjid di Kabupaten Wonosobo masih sangat sederhana, dari 37 masjid yang diteliti di Kabupaten Wonosobo yang sudah melakukan transparansi laporan keuangan sebanyak 26 masjid, sedangkan 11 masjid tidak melakukan transparansi laporan.

Masjid Baitul Gafur terletak di Lingkungan Gebang, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pihak pengurus masjid yakni pelaporan keuangan dalam bentuk buku kas yang disajikan dengan format no, tanggal, keterangan dan jumlah. Kemudian terdapat struktur kepengurusan masjid, rekapitulasi pembiayaan pembangunan masjid, dan juga penerimaan infak dana pembangunan masjid.

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi sehingga adanya tuntutan baru agar organisasi sektor publik memperhatikan Value for Money dalam menjalankan aktivitasnya (Sayuti et al., 2018). Value for Money ialah sebuah konsep dalam pengukuran kinerja. Value for Money yaitu indikator kinerja sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang

dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Penggunaan prinsip Value for Money dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki anggaran sektor publik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan *value for money* pada pengelolaan keuangan masjid baitul gafu, karena selain pentingnya pertanggungjawaban dan keterbukaan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pengelolaan keuangan masjid juga memperhatikan prinsip *value for money* (ekonomis, efisiensi, efektivitas) dalam penggunaan dana masjid yang mungkin memberikan perspektif yang berbeda dari penelitian yang hanya fokus pada akuntabilitas dan transparansi.

## TINJAUAN LITERATUR

Teori Stewardship menjelaskan bahwa ada asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini yaitu *stewards* dalam hal ini adalah para pengelola anggaran (pengurus masjid) diharapkan akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan principal (masyarakat). Teori ini lebih berfokus pada hasil yang ingin dicapai tanpa lebih mementingkan diri sendiri melainkan lebih mengutamakan kepentingan organisasi.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Poe & Saerang, 2013)(Nurrisziana et al., 2017). Yusran, (2021) mengatakan akuntabilitas publik adalah merupakan bentuk kewajiban bagi pengelola (*agency*) entitas milik publik yang dituntut untuk bertanggungjawab atas hasil kerjanya, karena pengelola (*agency*) telah mengelola sumber daya milik publik.

Transparansi adalah suatu kewajiban pengelola dalam melaksanakan prinsip keterbukaan proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Keterbukaan yang dimaksud berarti bahwa informasi yang disampaikan harus benar, lengkap/detail dan tepat waktu kepada semua *stakeholders* yang berwenang (Oktavia Widhawati et al., 2021)(Mayani et al., 2022). Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Hasugian et al., 2021).

*Value for money* adalah penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini menjelaskan bahwa setiap rupiah harus dihargai secara seimbang dan digunakan sebaik-baiknya. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money* yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (Sayuti et al., 2018).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus adalah pengamatan secara detail terhadap objek atau orang, baik pada titik waktu atau beberapa titik waktu. Dalam penelitian ini ada beberapa informan, yaitu: Ketua Takmir, Bendahara, Ketua Bidang Dakwah/Peribadatan dan Pendidikan

dan Jama'ah Masjid. Dengan jumlah informan total sebanyak 6 orang. Lokasi penelitian ini berada di Masjid Baitul Gafur yang terletak di Jalan I Gusti Jelantik Gosa Lingkungan Gebang Barat, Gang Cangkrung, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Proses analisis data dilakukan sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian sampai selesai. Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Windy & Subardjo, (2023) kegiatan analisis data dapat dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Masjid**

Akuntabilitas merupakan hal yang penting dari pembuatan laporan keuangan karena inti dari pembuatan laporan keuangan adalah menunjukkan hasilnya kepada masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terlihat dari bagaimana sikap pengurus masjid mengelola keuangan tersebut. Ada beberapa cara yang dilakukan pengurus masjid untuk melaporkan kondisi keuangan masjid, yaitu: Akurasi dan kelengkapan informasi pengelolaan keuangan Masjid Baitul Gafur dilakukan secara sederhana namun bertanggungjawab. Belum diterapkan ISAK 35 tidak serta-merta menghilangkan aspek akuntabilitas, sebab telah terdapat upaya pencatatan berdasarkan bukti transaksi, pengumuman rutin kepada jama'ah, serta keterbukaan terhadap akses informasi keuangan. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan, Masjid Baitul Gafur telah menetapkan kebijakan dengan sasaran yang jelas dan melaksanakan komunikasi secara transparan dan partisipatif, sehingga jama'ah merasa dilibatkan dan memahami arah kebijakan yang diambil oleh pengurus. Penyebarluasan informasi, Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengurus masjid tidak hanya menyampaikan informasi secara lisan tetapi juga menyediakan dokumentasi tertulis yang dapat diakses oleh seluruh jama'ah. Hal ini meningkatkan transparansi dan menunjukkan upaya untuk memberikan kejelasan informasi keuangan secara menyeluruh.

### **Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Masjid**

Transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukan karena jama'ah sekaligus donatur mempunyai hak untuk mengetahui arus kas masjid, sementara pengurus masjid mempunyai kewajiban untuk menyampaikan arus kas masjid. Prinsip transparansi adalah: Adanya keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dilakukan secara rutin, pengurus bersikap terbuka terhadap permintaan informasi tambahan, dan tersedia akses langsung bagi jama'ah yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai kondisi keuangan masjid. Adanya publikasi mengenai laporan pengelolaan keuangan, pengurus Masjid Baitul Gafur telah menunjukkan upaya yang serius dalam menjaga transparansi pengelolaan keuangan, baik melalui pengumuman rutin setiap Jum'at, penggunaan papan informasi (sebelum masa renovasi), maupun keterbukaan akses bagi jama'ah yang ingin mengetahui lebih lanjut. Meskipun penyampaian laporan masih dilakukan secara sederhana, keterbukaan informasi telah menjadi komitmen yang dijaga oleh pengurus demi membangun kepercayaan jama'ah terhadap pengelolaan keuangan masjid. Adanya laporan berkala mengenai laporan keuangan, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan di Masjid Baitul Gafur dilakukan secara berkala setiap minggu. Meskipun laporan bulanan dan tahunan tidak dipublikasikan secara umum, pengurus menyimpannya dan siap memberikan akses apabila diminta. Pola pelaporan mingguan ini menunjukkan tingkat transparansi yang baik serta adanya komitmen pengurus dalam menyampaikan kondisi keuangan masjid secara terbuka dan teratur kepada jama'ah. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang pengelolaan keuangan, pengelolaan informasi keuangan di Masjid Baitul Gafur dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Informasi disampaikan secara berkala dan juga dapat diakses sewaktu-waktu oleh

jama'ah. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pengurus untuk menjaga transparansi dan membangun kepercayaan dengan jama'ah. Kejelasan dan kelengkapan informasi, pengurus masjid telah berupaya menyediakan informasi keuangan yang cukup lengkap, terutama dalam hal pemasukan. Namun, aspek pengeluaran masih memerlukan peningkatan dalam hal penyampaian kepada jama'ah secara lebih terbuka dan detail, agar akuntabilitas keuangan dapat lebih maksimal.

### Prinsip Value for Money Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Masjid

Pada penelitian ini, penulis menganalisis data pada tahun 2020-2023 dan menjelaskan mengenai dana pembangunan Masjid Baitul Gafur dengan menggunakan konsep *value for money*, sehingga nantinya penulis ingin melihat apakah dana digunakan dengan ekonomis, efisien, dan efektivitas.

**Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Masjid Baitul Gafur Lingkungan Gebang**

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2020	Jumlah Pendapatan	1,624,869,000	1,227,380,500
2021	Jumlah Pendapatan	1,176,000,000	1,162,362,650
2022	Jumlah Pendapatan	320,000,000	330,158,150
2023	Jumlah Pendapatan	40,000,000	41,260,500

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Baitul Gafur Tahun Anggaran 2020-2023

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dilihat realisasi penggunaan keuangan dana masjid tahun 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023. Dari data diatas dapat dilihat bahwa masjid mendapatkan dana yang cukup besar yang dapat digunakan untuk pembangunan masjid agar dapat menjadi masjid yang lebih produktif kedepannya.

#### 1. Ekonomis

Rasio ekonomis memiliki dimensi yaitu pengalokasian dana yang dilakukan secara hemat. Pengalokasian dana secara hemat yaitu dana yang digunakan menghasilkan output dan outcome yang optimal sehingga tidak terjadinya pemborosan dana pada setiap kegiatan yang ada di Masjid Baitul Gafur. Pada rasio ekonomis dapat dilihat melalui dana pembangunan Masjid Baitul Gafur. Berikut persamaan untuk mengukur tingkat ekonomis:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input (Realisasi Anggaran)}}{\text{Nilai Input (Anggaran Pengeluaran)}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jika memperoleh nilai lebih dari 100% berarti sangat ekonomis.
2. Jika memperoleh nilai 90%-100% berarti ekonomis.
3. Jika memperoleh nilai 80%-90% berarti cukup ekonomis.
4. Jika memperoleh nilai 60%-80% berarti kurang ekonomis.
5. Jika memperoleh nilai di bawah 60% berarti tidak ekonomis.

**Tabel 2. Perhitungan Ekonomis Pengelolaan Keuangan Masjid Baitul Gafur Lingkungan Gebang**

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Ekonomis	Kriteria
2020	Jumlah Pendapatan	1,624,869,000	1,227,380,500	75,53%	Kurang Ekonomis
2021	Jumlah Pendapatan	1,176,000,000	1,162,362,650	98,84%	Ekonomis
2022	Jumlah Pendapatan	320,000,000	330,158,150	103,17%	Sangat Ekonomis
2023	Jumlah Pendapatan	40,000,000	41,260,500	103,15%	Sangat Ekonomis

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Baitul Gafur Tahun Anggaran (2020-2023) (Data Diolah Penulis, 2025)

$$\begin{aligned}\text{Rasio ekonomis tahun 2020} &= \frac{1,227,380,000}{1,624,869,000} \times 100\% = 75,53\% \\ \text{Rasio ekonomis tahun 2021} &= \frac{1,162,362,650}{1,176,000,000} \times 100\% = 98,84\% \\ \text{Rasio ekonomis tahun 2022} &= \frac{330,158,150}{320,000,000} \times 100\% = 103,17\% \\ \text{Rasio ekonomis tahun 2023} &= \frac{41,260,500}{40,000,000} \times 100\% = 103,15\%\end{aligned}$$

Selama anggaran tahun 2020 hingga 2023, tingkat ekonomis dalam pengelolaan dana Pembangunan Masjid Baitul Gafur mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, tingkat ekonomis pengeluaran tercatat sebesar 75,53%, dikategorikan sebagai kurang ekonomis, karena realisasi realisasi pengeluaran belum optimal dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan. Namun, pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup tajam, dengan tingkat ekonomis mencapai 98,84%, sehingga masuk dalam kategori ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, pengelolaan keuangan menjadi lebih ekonomis dan sesuai dengan prinsip value for money, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal. Selanjutnya, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup baik, dengan tingkat ekonomis mencapai 103,17%, sehingga masuk dalam kategori cukup ekonomis. Dan terjadi penurunan sedikit di tahun 2023, dengan tingkat ekonomis 103,15%, namun ini masih masuk dalam kategori cukup ekonomis.

## 2. Efisiensi

Rasio yang mempresetasikan hasil perhitungan antara perbandingan realisasi belanja dengan pendapatan merupakan definisi dari rasio efisiensi. Berikut persamaan untuk mengukur tingkat ekonomis:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jika memperoleh nilai lebih dari 100% berarti tidak efisiensi.
2. Jika memperoleh nilai 90%-100% berarti kurang efisiensi.
3. Jika memperoleh nilai 80%-90% berarti cukup efisiensi.
4. Jika memperoleh nilai 60%-80% berarti efisiensi.
5. Jika memperoleh nilai di bawah 60% berarti sangat efisiensi.

**Tabel 3. Perhitungan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Masjid Baitul Gafur Lingkungan Gebang**

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2020	Jumlah Pendapatan	1,624,869,000	1,227,380,500	75,53%	Sangat Efisiensi
2021	Jumlah Pendapatan	1,176,000,000	1,162,362,650	98,84%	Efisiensi
2022	Jumlah Pendapatan	320,000,000	330,158,150	103,17%	Tidak Efisiensi
2023	Jumlah Pendapatan	40,000,000	41,260,500	103,15%	Tidak Efisiensi

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Baitul Gafur Tahun Anggaran (2020-2023) (Data Diolah Penulis, 2025)

$$\begin{aligned}\text{Rasio efisiensi tahun 2020} &= \frac{1,227,380,000}{1,624,869,000} \times 100\% = 75,53\% \\ \text{Rasio efisiensi tahun 2021} &= \frac{1,162,362,650}{1,176,000,000} \times 100\% = 98,84\% \\ \text{Rasio efisiensi tahun 2022} &= \frac{330,158,150}{320,000,000} \times 100\% = 103,17\% \\ \text{Rasio efisiensi tahun 2023} &= \frac{41,260,500}{40,000,000} \times 100\% = 103,15\%\end{aligned}$$

Dari tabel diatas menggambarkan efisiensi Dana Pembangunan Masjid Baitul Gafur menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dikatakan efisien dengan persentase 75,53% yang berarti pengurus masjid dalam merealisasikan anggaran cukup besar dibandingkan dengan biaya pengelolaan masjid. Pada tahun anggaran 2021 rasio efisiensi mencapai 98,84% pengurus masjid dikatakan tidak efisien dalam mengeluarkan biaya untuk mengelola dana masjid. Kemudian, terjadi kenaikan persentase lagi sebesar 103,17% di tahun 2022, ini menggambarkan pengurus masih belum bisa melakukan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan. Dan pada tahun anggaran 2023 mencapai 103,15% pengurus masjid dikatakan tidak efisien, hal tersebut dipicu karena biaya-biaya yang dikeluarkan terlalu besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan anggaran.

### 3. Efektivitas

Rasio yang mempresentasikan tentang kemampuan dalam merealisasikan pendapatan yang dianggarkan 500tandard a dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Berikut persamaan untuk mengukur tingkat ekonomis:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jika memperoleh nilai lebih dari 100% berarti sangat efektif.
2. Jika memperoleh nilai 90%-100% berarti efektif.
3. Jika memperoleh nilai 80%-90% berarti cukup efektif.
4. Jika memperoleh nilai 60%-80% berarti kurang efektif.
5. Jika memperoleh nilai di bawah 60% berarti tidak efektif.

**Tabel 4. Perhitungan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Masjid Baitul Gafur Lingkungan Gebang**

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2020	Jumlah Pendapatan	1,624,869,000	1,227,380,500	75,53%	Kurang Efektif
2021	Jumlah Pendapatan	1,176,000,000	1,162,362,650	98,84%	Efektif
2022	Jumlah Pendapatan	320,000,000	330,158,150	103,17%	Sangat Efektif
2023	Jumlah Pendapatan	40,000,000	41,260,500	103,15%	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Keuangan Masjid Baitul Gafur Tahun Anggaran (2020-2023) (Data Diolah Penulis, 2025)

$$\text{Rasio efektivitas tahun 2020} = \frac{1,227,380,000}{1,624,869,000} \times 100\% = 75,53\%$$

$$\text{Rasio efektivitas tahun 2021} = \frac{1,162,362,650}{1,176,000,000} \times 100\% = 98,84\%$$

$$\text{Rasio efektivitas tahun 2022} = \frac{330,158,150}{320,000,000} \times 100\% = 103,17\%$$

$$\text{Rasio efektivitas tahun 2023} = \frac{41,260,500}{40,000,000} \times 100\% = 103,15\%$$

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pengukuran tingkat efektivitas Pembangunan Masjid Baitul Gafur mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dari 75,53% pada tahun 2020 menjadi 98,84% pada tahun 2021, persentasenya meningkat 23,31%, kemudian meningkat pada tahun 2022 sebesar 103,17% dan turun 2% di tahun 2023 menjadi sebesar 103,15%.

Persentase pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas Anggaran Pembangunan Masjid Baitul Gafur tahun 2020 dinilai kurang efektif karena berkisar 75,53%. Setelah itu, pada tahun 2021 persentase naik menjadi 98,84% yang dinilai efektif. Dan pada tahun berikutnya persentase naik lagi menjadi 103,17% yang dinilai sangat efektif, terjadi

penurunan persentase di tahun 2023 menjadi 103,15% tapi ini masih sangat efektif, sehingga efektif lebih dari 100%.

### **PENGELOLAAN KEUANGAN PADA MASJID**

Pengelolaan dana pada Masjid Baitul Gafur menjadi perhatian serius karena dana tersebut bersumber dari jama'ah atau masyarakat maupun pemerintah yang ditujukan untuk memakmurkan masjid. Oleh karena itu, pengurus masjid harus dapat bertanggungjawab dengan dana yang diberikan.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak H. Mawardi

“Masjid Baitul Gafur mendapatkan dana dari infaq yang diberikan oleh jama'ah. Contohnya waktu jama'ah memberikan infaq melalui kotak amal masjid sama kotak amal keliling tiap seminggu sekali.”

Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak Edi Suaidi S.Tr.Kep

“Dana yang diterima oleh masjid berasal dari infak dan shadaqah, juga dari kotak amal dan sumbangan yang dilakukan oleh siapa saja yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya untuk masjid. Dana ini dalam bentuk cash ataupun transfer, masjid juga mempunyai rekening sendiri. Nah dari dana tersebut, nantinya akan diakumulasikan semuanya, lalu disampaikan pada hari jum'at terkait dari siapa, berapa jumlahnya, dan total saldo kas masjid. Itu semua disampaikan sebelum shalat jum'at dilaksanakan, agar semua masyarakat tahu dan kita juga sebagai pengurus masjid terbuka, tidak ada yang kami tutupi.”

Dari sumbangan infak dan shadaqah yang diterima masjid kemudian akan dipergunakan untuk membiayai keperluan-keperluan masjid seperti pemeliharaan masjid, perbaikan, dan penggantian peralatan atau fasilitas masjid.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak Edi Suaidi S.Tr.Kep

“Salah satu contoh pengeluaran masjid itu misalnya tiap tahunnya sebelum menyambut bulan ramadhan masyarakat disini bergotong royong untuk mengecat tembok dan pagar masjid yang warnanya sudah pudar, kemudian membersihkan mukena, sajadah, bahkan karpet, lalu kita akan membersihkan lantai masjid, tempat wudhu, kamar mandi, bahkan sekitar masjid itu juga dibersihkan. Contoh lain juga kalau masjid mengadakan pengajian tentu akan mendatangkan penceramah untuk mengisi acara, biasanya dalam rangka hari besar, nah penceramah itu dibayar dek, nanti kita juga berikan buah tangan. Kalau contoh lainnya ya biaya listrik, biaya untuk mengganti alat-alat yang sudah rusak.”

Berikut kutipan hasil wawancara dengan Bapak Ahmadal Halusi

“Disini memang untuk pengumuman dana masjid itu sendiri dilakukan pada hari jum'at. Biasanya bendahara masjid nantinya memberikan selebaran yang berisikan rincian pemasukan, pengeluaran dan juga saldo kas masjid kepada bapak, nantinya bapak akan sampaikan di depan jama'ah sebelum dilaksanakannya shalat jum'at.”

Bentuk laporan keuangan yang telah dibuat oleh bendahara masjid merupakan satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan kepada jama'ah atau masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena sumber dana dari aktivitas-aktivitas pengelolaan masjid diperoleh dari jama'ah atau masyarakat yang kemudian dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan, yang mana selanjutnya akan diinformasikan kepada jama'ah baik secara mingguan, bulanan, dan tahunan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban dalam permasalahan berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Masjid Baitul Gafur masih melakukan pencatatan keuangan dengan sederhana, pengurus masjid belum paham dengan pedoman ISAK 35. Akan tetapi, pengurus masjid telah melaksanakan dengan baik melalui pencatatan transaksi, pertanggungjawaban bendahara dan pengumuman lisan rutin kepada jama'ah sebelum shalat jum'at. Hal ini menunjukkan adanya upaya transparansi dan pertanggungjawaban pengurus masjid dalam mengelola dana umat. Selain itu, akuntabilitas juga diwujudkan melalui program-program masjid yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan dampak positif kepada jama'ah atau masyarakat. Dampak positif dari program-program ini dirasakan oleh jama'ah atau masyarakat, dan pengumuman keuangan secara langsung semakin memperkuat kepercayaan dan menghilangkan potensi kecurigaan.
2. Transparansi pengelolaan keuangan di Masjid Baitul Gafur telah diupayakan melalui beberapa cara seperti keterbukaan informasi dengan kesediaan pengurus masjid menjawab pertanyaan, publikasi laporan keuangan secara lisan setiap shalat jum'at, penyampaian laporan keuangan secara berkala (setiap jum'at), penyediaan informasi yang cukup jelas mengenai sumber pendapatan dan upaya untuk memberikan informasi yang mudah dipahami. Jama'ah umumnya merada informasi yang disampaikan cukup baik, terutama mengenai pemasukan kas. Namun, terdapat catatan dari beberapa jama'ah mengenai kurangnya informasi detail terkait pengeluaran kas. Pengurus masjid menyadari pentingnya transparansi dan berencana untuk memasang kembali papan pengumuman setelah renovasi masjid selesai sebagai upaya perbaikan penyampaian informasi. Selain itu, saat ini belum ada media formal untuk menyampaikan kritik dan saran, namun rencana pembuatannya setelah renovasi merupakan langkah positif.
3. *Value for money* dalam hal ini sangat penting dilakukan karena untuk mengukur tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Sehingga dapat menghasilkan informasi bahwa ekonomis menunjukkan perbaikan yang signifikan, dari kurang ekonomis di tahun 2020 menjadi sangat ekonomis di tahun 2022 dan 2023. Efisiensi, berdasarkan data yang ada, efisiensi dalam menghasilkan pendapatan cenderung meningkat. Namun, kesimpulan yang lebih kuat memerlukan data biaya operasional. Efektivitas, dalam mencapai target pendapatan menunjukkan peningkatan yang dramatis, dengan target terlampaui di tahun 2022 dan 2023.

## REFERENSI

- Endang. (2017). *PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID JAMIK AN-NUR SEKAYU*. VI(1), 41–56.
- Haryanti, S., & Kaubab, M. E. (2019). ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MASJID DI WONOSOBO (STUDI EMPIRIS PASA MASJID YANG TERDAFTAR DI KEMENAG KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1).
- Hasugian, F. T. S. P., Syahputra, R. A., & Harahap, A. R. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah , Value For Money , Kejujuran , Transparansi , Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah ( Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Pusat )*. 6(2), 175–185.

- Ismatullah, I., & Kartini, T. (2018). *TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT*. 6, 186–204.
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.15273>
- Kusumadyahdewi. (2018). Pengelolaan Keuangan Masjid Sebagai Organisasi Nirlaba. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 4(2), 81. <https://doi.org/10.18860/jpips.v4i2.7312>
- Makrifudin, Y., Afifudin, & Sari, A. F. K. (2022). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID AGUNG ISLAMIC CENTER AL-MUTTAQIN CAKRANEGARA, KOTA MATARAM BERDASARKAN ISAK 35. *E-Jra*, 11(09), 84–92.
- Mayani, K. A., Effendy, L., & Nurabiah. (2022). Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tamansari Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 45, 3(2), 80–88.
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(1), 28–47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Oktavia Widhawati, E., Suhartini, D., & Aning Widoretno, A. (2021). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI SEBAGAI IMPLEMENTASI ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). *Jurnal Proaksi*, 8(2), 363–375.
- Poae, D. A., & Saerang, D. P. E. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitasnya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL ACCOUNTABILITY*, 2(1), 27–35.
- Pratama, F. D., Animah, & Nurabiah. (2023). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Mataram. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(05), 843–852.
- Putri, S. A., Azmi, Z., & Asnawi, M. (2022). *Apakah Informasi Akuntansi Berdasarkan ISAK 35 Diperlukan Untuk Kualitas Laporan Keuangan Masjid ?* 2(1), 200–210.
- Sari, N. A., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah Di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1), 27–40.
- Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, M. S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16–28. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.39>
- Tarmizi, A., & Kurniawan, I. (2016). Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Jami' Islamiyah. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 113–132.

- Windy, & Subardjo, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(1), 4–5.
- Yusran, M. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Masjid Studi Kasus pada Masjid di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 33–46. <https://doi.org/10.30596/jakk.v4i1.6854>